



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1955 TENTANG  
PERATURAN-PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN  
PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 78) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 tentang peraturan-peraturan sementara mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955;

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 20 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN-PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955, (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 78), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

#### Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 mengenai kedudukan anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 78), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 1.

Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 Lembaran Negara tahun 1950 No. 5 (Undang-undang No. 12 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 42), dengan tidak ada yang dikecualikan, sesudah akhir tahun 1955 dianggap tetap dalam dinas ketentaraan; satu sama lain tidak mengurangi kebebasan masing-masing anggota Angkatan Perang untuk menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan.

#### Pasal 2.

Pada prinsipnya, anggota Angkatan Perang yang ingin keluar dari dinas ketentaraan diperkenankan meninggalkan dinas tersebut.

Pasal 3. ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3.

Mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut.

### Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi para pelajar Angkatan Perang (P.A.P.).

### Pasal 5.

Pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan.

### Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1956.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
SUKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 26 Juli 1958.  
Menteri Kehakiman,  
ttd.

G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertahanan,  
ttd.  
DJUANDA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 105



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN  
MENGENAI  
UNDANG-UNDANG No. 55 TAHUN 1958  
TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No. 20 TAHUN 1955 TENTANG  
PERATURAN-PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN ANGGOTA ANGKATAN  
PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 78), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pemerintah menginsyafi, bahwa sebelum akhir tahun 1955, haruslah sudah ada peraturan yang akan mengatur untuk selanjutnya kedudukan hukum anggota-anggota Angkatan Perang, yang waktu ikatan dinasnya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1955.

Mengingat urgensi dan pentingnya peraturan, tersebut, maka dikeluarkan oleh Pemerintah Undang-undang Darurat No. 20 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 78), yang seluruh teks dan penjelasannya dilampirkan pada rancangan Undang-undang ini.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1640

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-65 pada tanggal 9 Juni 1958, pada hari Senin, P.20/1956